

JURNAL

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	i
PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL MEMACU KESETARAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL* <i>Rusmin Tumanggor</i>	1 - 17
PROFIL WKSBM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG (Studi Kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan) <i>Suyanto dan Bambang Pudjianto</i>	18 - 31
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PENGUSAHA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERILAKU PROSOSIAL UNTUK Penguatan KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR <i>Irmayani</i>	32 - 44
PERAN KELOMPOK SOSIAL DALAM Penguatan KETAHANAN SOSIAL (Sebuah Kajian Modal Sosial di Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali) <i>Mochamad Syawie</i>	45 - 51
PROGRAM SUBSIDI PANTI DEMI KELANGSUNGAN PELAYANAN PANTI SOSIAL (Studi di Kota Medan - Sumatera Utara) <i>Suradi</i>	52 - 63
PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LAPAS ANAK BLITAR <i>Yanuar Farida Wismayanti</i>	64 - 73
FILANTROPI MODERN UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL <i>Chusnan Jusuf</i>	74 - 80

PENGANTAR REDAKSI

Berbagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, namun hingga kini masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam kerangka mengkritisi hasil pembangunan, Rusmin Tumanggor mengangkat isue kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai pedoman dalam tata kehidupan dan kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kearifan lokal tersebut tentunya penting untuk diakomodasikan dalam berbagai program yang ditawarkan pada setiap lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Menurut pandangan Tumanggor, untuk mempercepat gerak mereka ke garis pacu kesejajaran dengan komunitas lain, harus dimulai dari ide, aktivitas sosial serta materi kebudayaan masyarakat setempat yang dijadikan pedoman ketika merancang, memprogram, dan mengimplementasi pembangunan KAT. Memang tidak mudah mengubah paradigma budaya KAT, perlu waktu dan melibatkan berbagai instansi di dalamnya.

Pemberdayaan kearifan lokal dicoba diterapkan dalam bentuk WKSMB, yaitu sebuah sarana pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Perkumpulan sosial yang dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat yang ada di Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini, ternyata mampu mengintegrasikan masyarakat dan menjadi kekuatan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Peningkatan ketahanan sosial tidak hanya digalang oleh masyarakat tetapi juga di kalangan pengusaha, melalui tanggung jawab sosial dunia usaha. Ini merupakan suatu strategi untuk menumbuhkan kesadaran berbagi, membangun kerjasama atau kemitraan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Irmayani menganggap tanggung jawab sosial dunia usaha mampu menjadi penguat ketahanan sosial masyarakat melalui kontribusinya terhadap penanganan penyandang masalah yang dikembangkan melalui model kemitraan usaha serta didukung oleh masyarakat di lingkungan industri tersebut.

Penguatan ketahanan sosial bisa pula dilakukan melalui kelompok-kelompok sosial, seperti kelompok kesenian, P2WKSS, Karang Taruna dan PKK yang diteliti oleh Mochamad Syawie di Desa Abiansemal, Badung, Bali. Dari kajian terhadap empat kelompok tersebut, tampaknya dukungan modal sosial menjadi penyangga utama ketahanan sosial masyarakat di sana.

Bagaimanapun juga tampaknya peran Pemerintah masih diharapkan bagi pembangunan kesejahteraan sosial, terutama pada pemberian pelayanan di panti sosial. Program subsidi panti menjadi perhatian Suradi dalam bahasan ini. Ia mencoba mengevaluasi 10 panti yang ada di Sumatera Utara, yang memperoleh subsidi dan ternyata Program Subsidi yang diharapkan mampu mengurangi beban pembiayaan penyelenggaraan pelayanan, tampaknya hanya menjadi stimulus bagi penyelenggaraan pelayanan. Pada satu pihak dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan makanan bergizi namun di pihak lain, subsidi belum mampu memberikan manfaat yang signifikan karena adanya keterbatasan.

Mengangkat masalah anak yang berkonflik dengan hukum, di tengah bahasan tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui kearifan lokal dan program pemerintah, tampaknya menjadi sah-sah saja. Yanuar Farida mencoba mengangkat kasus anak di Lapas Anak Blitar yang ditelitinya beberapa waktu lalu. Ternyata dari identifikasi permasalahan, masih

banyak terlihat pelanggaran atas hak anak dan perlakuan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Lagi-lagi masalah koordinasi berbagai lembaga/institusi yang dipersalahkan, karena senyatanya keterlibatan pihak lain mampu memecahkan permasalahan yang ada.

Sementara Chusnan Yusuf melihat pembangunan sosial dari sudut pandang filantropi, yang berawal dari sikap kedermawanan (*charitas*) hingga berkembang menjadi lebih profesional dengan mengedepankan pelayanan dan advokasi. Filantropi dianggap dapat mendukung intervensi pembangunan sosial masyarakat.

REDAKSI